

KETRANSITIFAN TEKS BERITA PUNGUTAN LIAR DI SEKOLAH MELALUI MEDIA DARING

*(Transitivity of News Text regarding Illegal Retribution at Schools
through Online Media)*

Nurlina Arisnawati

Balai Bahasa Sulawesi Selatan

Jalan Sultan Alauddin Km 7 Talasalapang, Makassar

Pos-el: nhana.amran@gmail.com

(Naskah Diterima Tanggal: 20 Maret 2020; Direvisi Akhir Tanggal 16 Mei 2020;

Disetujui Tanggal; 18 Mei 2020)

Abstract

Corruption is a big problem in Indonesia, and it is always reporting on media. One of them is illegal retribution in school. This research discusses the transitivity of news text regarding the wild levy at school. The aim is to describe the meaning of the material process through the verb of transitivity in reporting illegal retribution at school. The method used is a descriptive-qualitative method with a critical discourse analysis approach by Norman Fairclough. Data on this research are transitive sentences, and the source of the data is the news text of illegal retribution at school, which takes from the online media of beritakotamakassar.fajar.co.id, and makassar.tribunnews.com with ten titles of news regarding the wild retribution at school published in March 2017. The results of this research indicate that in terms of transitivity, online media (beritakotamakassar.fajar.co.id and makassar.tribunnews.com) use meaningful material processes of actions, circumstances, events, and mental processes (behaviors) in reporting case of the illegal retribution at school. This transitivity reveals that these two online media use more active verbs rather than passive verbs, which indicate that media are more likely to mention actors rather than to hide subjects, in particular on the dominant actor or subject. Dominant subjects are shown or highlighted by using active verbs, while dominated actors are displayed using passive verbs. The more dominant active verb used is the active verb, which states the meaning of action. It indicates that both media strongly support the steps or actions taken by Law Institutions (Kejari) in handling cases of illegal retribution in school.

Keywords: *transitivity; critical discourse analysis; Norman Fairclough; illegal retribution at school*

Abstrak

Korupsi merupakan masalah besar di Indonesia sehingga tiada hari tanpa pemberitaannya di media. Salah satunya adalah pungutan liar (*pungli*) di sekolah. Tulisan ini membahas ketransitifan teks berita pungli di sekolah. Tujuannya adalah mendeskripsikan makna proses material melalui verba ketransitifan dalam pemberitaan pungli di sekolah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis model *Norman Fairclough*. Data dalam penelitian ini berupa kalimat transitif, dan sumber datanya adalah teks berita pungli di sekolah yang diambil dari media daring beritakotamakassar.fajar.co.id, dan makassar.tribunnews.com dengan sepuluh judul berita tentang pungli di sekolah yang terbit pada bulan Maret 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi ketransitifan, media daring (beritakotamakassar.fajar.co.id dan Makassar.tribunnews.com) menggunakan proses material bermakna perbuatan, keadaan, peristiwa dan proses mental (perilaku) dalam memberitakan kasus pungli di sekolah. Ketransitifan ini mengungkapkan bahwa kedua media daring ini lebih banyak menggunakan verba aktif daripada verba pasif yang menandakan bahwa media tersebut lebih cenderung menyebutkan aktor (subjek) daripada menyembunyikan subjek,

terutama pada aktor atau subjek dominan. Subjek dominan ditampilkan atau ditonjolkan dengan verba aktif, sedangkan subjek yang terdominasi ditampilkan melalui verba pasif. Verba aktif yang lebih dominan digunakan adalah verba aktif yang menyatakan makna ‘perbuatan’. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua media sangat mendukung langkah atau perbuatan (tindakan) yang dilakukan oleh lembaga hukum (Kejari) dalam menangani kasus pungli di sekolah.

Kata kunci: ketransitifan; analisis wacana kritis; Norman Fairclough; pungutan liar di sekolah

PENDAHULUAN

Teks berita korupsi merupakan teks yang berisikan informasi atau berita mengenai berbagai peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan korupsi yang sedang terjadi di masyarakat dan pemerintahan yang disajikan melalui media massa, seperti penyalahgunaan anggaran, *mark up*, suap, pungutan liar, laporan fiktif, dan sebagainya. Dari beberapa kasus korupsi tersebut, kasus yang dianggap cukup menarik untuk dibahas dalam tulisan ini adalah pungutan liar (pungli), khususnya pungutan liar di sekolah. Hal ini mengingat bahwa pada tahun 2017, pemberitaan kasus pungli ini marak menghiasi media di Indonesia termasuk media daring seperti *beritakotamakassar.fajar.co.id*, dan *makassar.tribunnews.com*. Hal ini terkait dengan pungli yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemerhati Korupsi Global, Transparency International (TI) bahwa Kota Makassar termasuk daerah yang cenderung menunjukkan stagnasi/penurunan dalam upaya pemberantasan korupsi (Thohary, Suyatmiko, Yazid, dan Ratnanintyas, S., 2015). Ini terbukti dengan maraknya pungli di sekolah, khususnya di sekolah menengah atas/ sederajat di Makassar. Dalam hal pemberitaan tentang pungli di sekolah ini, media dimanfaatkan sebagai gerakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar pembaca dapat melihat sisi lain dari sebuah wacana, yakni wacana tidak hanya sekadar teks semata yang memberikan informasi, tetapi dapat melihat wacana dari sudut pandang yang kritis mengenai bagaimana suatu teks diproduksi

sehingga menghasilkan suatu perubahan sosial. Menurut (Rahmat Prayogi, 2016: 2), era digital dan keterbukaan informasi seperti saat ini, menuntut masyarakat untuk semakin jeli dalam memilih berita agar tidak mudah terprovokasi, tidak mengikuti agenda media serta masih dapat mempertahankan ”netralitasnya” sebagai pembaca. Untuk itu, pembaca harus mencoba menelisik lebih jauh “bagaimana” dan “mengapa” berita-berita itu dihadirkan yang akan membawa kita untuk memahami tentang hegemoni (ideologi dan kekuasaan) yang tersembunyi di balik teks-teks berita itu. Untuk memahami itu, tentu saja dapat dilihat dari piranti bahasa yang digunakan dalam teks.

Dengan teks sebagai kajian, tulisan ini merupakan analisis wacana kritis yang melihat bahasa dalam teks untuk dianalisis. Bahasa dianalisis tidak hanya menggambarkan aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Oleh karena itu, dalam menganalisis teks berita kasus pungutan liar di sekolah akan dikaitkan dengan aspek-aspek di luar teks seperti yang memproduksi teks, masyarakat pembaca, dan konteks sosial yang memengaruhi produksi teks. Oleh karena itu, teori analisis wacana kritis yang digunakan dalam menganalisis teks berita pungli di sekolah ini adalah model Norman Fairclough yang menitikberatkan pada bahasa sebagai praktik sosial.

Belakangan ini, artikel atau penelitian yang menggunakan pendekatan analisis wacana kritis telah banyak dikaji (lihat (Setiawan, 2011); Vidiadari (2017); Rahmawati (2017), mengkaji aspek linguistiknya (lihat Santoso, 2008); Rasyid (2009); Sumarti (2010); Suharyo (2014); sedangkan penelitian yang memfokuskan pada berita korupsi dilakukan

oleh Rahmat Prayogi, (2016) dengan judul *Wacana Berita Bertajuk Korupsi dalam Situs Indonesiana dan Implikasi Pembelajaran Analisis Wacana*. Penelitian tersebut menggunakan teori analisis wacana kritis model Norman Fairclough untuk mengungkap teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural dalam berita bertajuk korupsi dalam situs Indonesia; sedangkan penelitian lain yang mengungkap tentang ketransitifan dilakukan oleh Sunaidin Ode Mulae (2014). Penelitian tersebut mengungkapkan ketransitifan dari segi proses material, yaitu proses kata kerja yang melukiskan atau menggambarkan proses tindakan fisik. Selain itu, tulisan tersebut juga mengungkapkan bentuk praktik wacana yang digunakan dalam teks berita "*Roots of The North Maluku Conflict*" yang meliputi identifikasi dan kategorisasi. Kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan yang sama, yaitu analisis wacana kritis model Fairclough dengan objek yang berbeda. Namun, penelitian tentang korupsi yang bersentuhan dengan bidang pendidikan seperti teks berita pungutan liar di sekolah masih sangat terbatas. Demikian halnya dengan penelitian yang membahas tentang ketransitifan dalam teks berita pungutan liar (pungli) di sekolah juga masih terbatas. Oleh karena itu, tulisan atau penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui ketransitifan dalam teks berita pungli di sekolah.

Ketransitifan memiliki banyak versi. Dalam linguistik struktural, ketransitifan dikaitkan dengan keberadaan verba yang dapat diikuti oleh objek langsung atau komplemen, atau bahkan tidak dapat diikuti keduanya; sedangkan dalam studi bahasa kritis, teori ketransitifan berkaitan dengan teori dari aliran linguistik fungsional sistemik dari M.A.K. Halliday yang bersumber dari fungsi representasi bahasa, yakni fungsi bahasa yang bertugas: (1) menyandikan (*encode*) pengalaman tentang dunia, dan (2) membawa gambaran tentang realitas (dalam Santoso, 2012: 151). Dari teori ini, dikenal tiga macam ketransitifan, yaitu (a) proses material atau

tindakan, (b) proses mental atau proyeksi, dan (3) proses relasi atau menjadi. Pemaknaan terhadap ketransitifan ini berpangkal pada "predikat" dan satu nomina atau lebih yang terkait dengan predikat.

Pemaknaan terhadap ketransitifan pernah dilakukan oleh Pratiwi (2012) dengan judul *Diskriminasi Perempuan dalam Berita Harian Surya: Kajian Wacana Kritis*. Hasil pemaknaannya menunjukkan bahwa kalimat transitif dapat mengonstruksikan diskriminasi terhadap perempuan pada pemberitaan di media cetak. Wartawan dalam membuat berita berkecenderungan lebih menonjolkan pihak perempuan sebagai korban dan Winarti (2012) dengan judul penelitian "Representasi Intertekstual (Kutipan Langsung dan Kutipan Tidak Langsung) dan Tekstual (Ketransitifan) dalam Wacana berita Bom Bunuh Diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton, Solo" mengungkapkan bahwa ketransitifan (kalimat aktif) menunjukkan bahwa *Media Indonesia*, *Republika*, dan *Kompas Indonesia* lebih banyak menempatkan pemerintah sebagai subjek pelaku yang bertanggung jawab atas segala masalah terorisme di Indonesia. Pihak pemerintah yang senantiasa ditempatkan sebagai subjek dalam strategi transifitas ini dapat juga menandakan kuasa pihak pemerintah itu sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk menegaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa pihak pemerintah telah bekerja dengan baik dalam mengatasi masalah terorisme di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini juga membahas tentang ketransitifan, yaitu ketransitifan teks berita pungutan liar (pungli) di sekolah dalam media daring. Ketransitifan yang dibahas dalam hal ini adalah makna proses material dalam teks berita pungli di sekolah di *beritakotamakassar.fajar.co.id* dan *makassar.tribunnews.com*. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan tentang ketransitifan dalam teks berita pungli di sekolah, di *beritakotamakassar.fajar.co.id.*, dan *makassar.tribunnews.com*. Ketransitifan dalam artikel ini hanya meliputi proses material saja dengan melihat verba aktif

dan verba pasif yang ditonjolkan media dalam memproduksi beritanya dan juga akan melihat cara subjek ditampilkan atau ditonjolkan dalam teks terkait dengan verba. Selain untuk melengkapi penelitian yang ada, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan sebagai referensi dalam bidang wacana kritis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Pendekatan ini dianggap tepat untuk digunakan dalam analisis yang berbasis teks berita karena pendekatan ini menekankan pada bahasa sebagai praktik sosial. Artinya, cara mengungkap praktik-praktik sosial seperti pungli di sekolah melalui penggunaan bahasa dengan berdasar pada analisis tiga dimensi wacana, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural yang pada akhirnya dapat menguak ideologi dan kekuasaan yang ada dalam teks berita pungli di sekolah di *beritakotamakassar.fajar.co.id*, dan *makassar.tribunnews.com*.

KERANGKA TEORI

Teori analisis wacana kritis (AWK) yang diterapkan dalam tulisan ini adalah teori Norman Fairclough. Fairclough (1989: 22) mengungkapkan pengertian wacana kritis yaitu *language as a form of social practice* ‘bahasa sebagai praktik sosial.’ Artinya, penggunaan bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang menggambarkan hubungan dialektis di antara peristiwa tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Penggunaan label kritis dalam kajian ini mempunyai makna tersendiri dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan yang mungkin disembunyikan dari orang-orang seperti hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi yang mengacu pada wacana yang dikaji. Oleh karena itu, Fairclough berupaya menteoretisasikan wacananya dengan menggabungkan beberapa tradisi, yakni linguistik, tradisi interpretatif, dan sosiologi. Untuk menggabungkan tradisi tersebut, Fairclough

membuat sebuah formulasi wacana yang juga disebut dengan wacana tiga dimensi, yaitu sebuah wacana yang penandaannya meletakkan pada tiga dimensi dalam setiap produksi wacana yang meliputi: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial (Fairclough, 1995: 98). Setiap dimensi ini memiliki wilayah dan proses dan ketiganya berhubungan secara dialektis.

Dimensi pertama adalah teks yang merupakan hasil dari proses produksi. Teks yang dimaksud dalam hal ini adalah teks-teks bahasa (lisan dan tulisan). Peran bahasa sangat menentukan dalam menganalisis dan membongkar kepentingan, nilai atau ideologi di baliknya karena tujuan akhir dari analisis wacana kritis (AWK) adalah membongkar bentuk-bentuk dominasi, diskriminasi, atau prasangka yang merugikan melalui bahasa (Haryatmoko, 2017: 8). Kedua adalah praktik diskursif yang terkait dengan interaksi. Interaksi teks dengan individu atau masyarakat dalam bentuk proses produksi dan interpretasi. Dimensi ketiga adalah praktik sosial atau konteks yang mencakup praktik-praktik sosio-kultural di mana proses produksi dan interpretasi itu berlangsung. Ketiga dimensi itu kemudian dianalisis dengan tiga model analisis yang berbeda, yaitu 1) deskripsi, digunakan untuk menganalisis teks; 2) interpretasi, digunakan untuk menganalisis proses produksi dan interpretasi teks; dan 3) eksplanasi, digunakan untuk menganalisis praktik-praktik sosiokultural yang mencakup level situasional, institusional, dan sosial.

Dalam model Fairclough, teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat *vocabulary* ‘kosakata’, *grammar* ‘gramatika’, dan *textual structures* ‘struktur tekstual’ (Fairclough, 1989: 110—112). Aspek-aspek linguistik ini menjadi sumbu utama dalam sebuah kajian wacana, termasuk kajian tentang ketransitifan. Ketransitifan dalam teori Fairclough digolongkan ke dalam aspek gramatika.

Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa ketransitifan memiliki banyak versi, yaitu linguistik struktural, linguistik fungsional sistemik, dan teori wacana. Dalam linguistik

struktural, ketransitifan dikaitkan dengan keberadaan verba yang dapat diikuti oleh objek langsung atau komplemen, atau bahkan tidak dapat diikuti keduanya sehingga lahirlah empat istilah yang dikenal dengan: ekatransitif, dwitransitif, semitransitif, dan intransitif. Dalam linguistik fungsional sistemik, ketransitifan dikaitkan dengan pemahaman terhadap realitas terhadap “apa yang sedang berlangsung”, dan lahirlah istilah proses material, proses relasi, dan proses proyeksi; sedangkan dalam teori wacana, ketransitifan dikaitkan dengan informasi lama dan informasi baru. Dari teori ini, dikenal istilah klausa yang memiliki ketransitifan tinggi dan ketransitifan rendah. Namun, dalam studi bahasa kritis, teori ketransitifan berkaitan dengan teori dari aliran linguistik fungsional sistemik dari M.A.K. Halliday (dalam Santoso, 2012) yang bersumber dari fungsi representasi bahasa, yakni fungsi bahasa yang bertugas: (1) menyandikan (*encode*) pengalaman tentang dunia. dan (2) membawa gambaran tentang realitas. Gambaran mental itu dapat berupa struktur frasa, klausa, dan kata. Oleh karena itu, secara kritis, ketransitifan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seperangkat kategori universal yang mencirikan jenis peristiwa dan proses yang berbeda, tipe partisipan yang berbeda dalam peristiwa tertentu, serta berbagai keadaan tempat dan waktu dalam peristiwa yang terjadi dalam teks berita pungli di sekolah.

Dalam kaitannya dengan ketransitifan, Halliday (dalam Santoso, 2012: 151) menyebutkan tiga macam ketransitifan, yakni (1) proses material atau tindakan, (2) proses mental atau proyeksi, dan (3) proses relasi atau menjadi. Proses material meliputi proses-proses: (a) perbuatan, (b) kejadian, dan (c) perilaku. Proses mental meliputi proses-proses (a) persepsi, (b) afeksi, dan (c) kognisi. Proses relasi atau menjadi meliputi proses-proses (a) atributif, (b) identifikasi, dan (c) eksistensial, sedangkan Fowler (1986) membagi ketransitifan dalam tiga tipe, yaitu (1) tipe tindakan, yaitu sebuah gerakan atau tindakan yang disengaja dengan konsekuensi di bawah kontrol nomina;

(2) tipe nontindakan, meliputi dua hal, yakni keadaan dan proses; dan (3) tipe mental, yaitu ketransitifan yang berbentuk “proses mental” dan “keadaan mental”. Sementara Fairclough dalam mengkaji ketransitifan, menekankan pada bentuk proses, yaitu apakah seseorang, kelompok, atau kegiatan itu ditampilkan dalam bentuk tindakan, peristiwa, keadaan, atau proses mental. Oleh karena itu, untuk kepentingan tulisan ini, penulis akan mengacu kepada teori ketransitifan dari M.A.K Halliday yang umumnya digunakan dalam kajian bahasa kritis, khususnya ketransitifan proses material dan juga teori ketransitifan dalam pandangan Fairclough sebagai pisau bedah dalam tulisan ini. Hal ini mengikuti pandangan Fairclough bahwa ketika seseorang memberikan representasi secara tekstual terhadap tindakan, peristiwa, keadaan, dan hubungan yang nyata atau imajiner, sering terdapat pilihan antara tipe-tipe proses dan partisipan yang berbeda dan seleksi yang dibuat itu memiliki signifikansi secara ideologis.

Ketransitifan dianalisis untuk mengetahui proses material makna apa saja yang digunakan dalam teks berita korupsi (pungutan liar di sekolah) dan bagaimana pilihan ketransitifan makna proses material itu merepresentasikan teks berita korupsi khususnya teks berita pungutan liar (pungli) di sekolah yang sekaligus sebagai tahap eksplanasi dalam dimensi sosiokultural model analisis wacana Fairclough. Ketransitifan sebuah kalimat dilihat dari penggunaan verba yang mengonstruksi kalimat transitif, apakah kalimat aktif atau kalimat pasif. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Fairclough (1989: 39) bahwa subjek juga mempunyai dua arti yang tepat seperti halnya dengan dua arti dari praktek dan diskursus, meskipun sedikit berbeda. Dalam pengertian ‘subjek’, pertama, mengacu pada seseorang yang berada di bawah hak hukum kekuasaan politik. Oleh karena itu subjek bersifat pasif dan terkondisikan: Namun, subjek suatu kalimat, misalnya, biasanya bersifat aktif, sebagai ‘pelaku’, yakni seseorang yang begitu saja terlibat dalam suatu tindakan.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang memandang wacana sebagai teks. Oleh karena itu, melalui analisis wacana kritis model Norman Fairclough ini, penulis akan menelisik lebih lanjut bagaimana media daring *beritakotamakassar.fajar.co.id*, dan *makassar.tribunnews.com* mengonstruksi berita korupsi tentang pungutan liar di sekolah.

Data dalam penelitian ini berupa kalimat transitif dan sumber data adalah teks berita tentang pungutan liar (pungli) di sekolah yang diambil dari media daring Makassar, Sulawesi Selatan yang meliputi *beritakotamakassar.fajar.co.id*, dan *makassar.tribunnews.com*. Pemilihan media daring (*online*) ini didasarkan pada alasan media lokal. Artinya, media daring (*online*) *beritakotamakassar.fajar.co.id* ini merupakan salah satu subdomain dari media Fajar (*Fajar.co.id*) yang merupakan salah satu media yang cukup lama dan terkenal di wilayah Sulawesi Selatan terutama di Makassar. Peringkatnya pun berada di peringkat ketiga dari lima puluh media *online* di Sulsel versi Alexa; sedangkan *makassar.tribunnews.com* merupakan subdomain dari Tribun Timur dan media daring yang berada pada peringkat pertama (Wartasulsel, 2018)

Data diambil dari kedua media tersebut yang terdiri atas sepuluh judul berita. Lima berita dari *beritakotamakassar.fajar.co.id*, yaitu (1) *Kepala SMAN 1 Tersangka Pungli*, (2) *Ketua Ombudsman: Pungli di SMA Gila-gilaan*, (3) *Jaksa Periksa 30 Orang Tua Siswa SMAN 5*, (4) *Mutasi Kepala SMA/SMK Usai UN*, dan (5) *Kepsek Butuh Evaluasi, Bukan Mutasi*; dan lima berita dari *makassar.tribunnews.com*, dengan judul: (1) *Guru SMAN 5 Makassar Benarkan Ada Pungli*, (2) *Tersangka Pungli, Kepsek SMAN 1 dan SMAN 5 Makassar Dicopot*, (3) *Kejaksaan Pastikan Masih Ada Tersangka Baru Pungli SMA di Makassar*, (4) *Pungut Pembayaran Calon Siswa Baru, Dua Guru SMA 1 Makassar Diperiksa*, dan (5) *Ada Fakta Baru,*

Kejari Jemput Paksa Kepsek SMA 5 Makassar di Lapas. Data yang diambil adalah data tentang pungli pada tahun 2017 terutama yang terbit di bulan Maret 2017. Alasannya, pada tahun tersebut kasus pungli di sekolah marak mencuat ke permukaan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dengan cara mencari, membaca, kemudian menentukan judul berita dan media yang akan dijadikan objek kajian. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan Norman Fairclough yang mengkaji wacana dengan tiga dimensi, yaitu teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural. Dimensi teks dan praktik wacana dianalisis secara simultan dengan cara deskripsi dan interpretasi, sedangkan dimensi praktik sosiokultural dilakukan secara eksplanasi untuk menguak ideologi dan kekuasaan yang tersembunyi di balik ketransitifan teks berita pungli di sekolah pada *beritakotamakassar.fajar.co.id*, dan *makassar.tribunnews.com*.

PEMBAHASAN

Dalam ketransitifan, dikenal adanya proses material, proses proyeksi, dan proses relasi. Namun, yang menjadi pokok pembahasan dalam teks berita pungli di sekolah di *beritakotamakassar.fajar.co.id* dan *makassar.tribunnews.com* ini hanya meliputi proses material, yaitu proses kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Proses material ini meliputi makna: ‘perbuatan’, ‘keadaan’, ‘peristiwa/kejadian’ dan ‘perilaku/proses mental’. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Perbuatan

Makna sebuah wacana ditentukan oleh predikat atau nomina yang terkait dengan predikat itu. Predikat diidentifikasi dari verba yang digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis aktivitas atau keadaan yang terkait dengan nomina yang mengikutinya. Teks berita pungutan liar di sekolah di media *online*. *beritakotamakassar.fajar.co.id* cenderung menggunakan verba aktif daripada pasif. Hal ini menandakan bahwa media lebih

cenderung menyebutkan subjek daripada menyembunyikan subjek, terutama pada subjek-subjek dominan. Berikut kutipannya.

- (1) Lebih jauh Deddy menjelaskan, penyidik telah *menemukan* lebih dari dua alat bukti terkait kasus dugaan pungutan sejumlah uang dari siswa baru di SMAN 1 Makassar (Ronalyw, 2017a: Paragraf 5, kal.1).

Penggunaan verba aktif pada data (1) yang ditandai dengan kata *menemukan* juga digunakan untuk menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Penyidik Kejari yang telah *menemukan* lebih dari dua alat bukti terkait kasus dugaan pungutan sejumlah uang dari siswa baru di SMAN 1 Makassar. Verba aktif *menemukan* ini juga memarjinalkan pihak terdominasi, yaitu Abdul Hajar sebagai tersangka pungli. Dari *verba* menemukan tersebut terlihat bahwa pihak dominan begitu kokoh dalam memperjuangkan ideologinya sebagai institusi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengungkap dan memberantas kasus korupsi, seperti pungli di sekolah. Selain itu, yang dilakukan oleh Kejari ini memunculkan persepsi bahwa sesungguhnya pihak Kejari memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan institusinya sebagai lembaga yang memiliki integritas yang tinggi dalam penegakan hukum. Ada ideologi yang berusaha dipertahankan oleh pihak dominan, yaitu menyelesaikan perkara korupsi secara tepat dan cepat. Penyidik dalam data (1) direpresentasikan sebagai subjek atau pelaku, yaitu partisipan yang memiliki relasi kekuasaan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan kasus korupsi, termasuk pungutan liar yang terjadi di beberapa sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat di Makassar terutama sekolah-sekolah favorit seperti SMAN 1 Makassar. Dengan menonjolkan partisipan sebagai subjek atau pelaku di awal kalimat, secara tidak langsung si penulis atau media menunjukkan dukungannya terhadap kinerja penyidik dalam menyelesaikan kasus pungli tersebut. Namun, ini berbeda ketika penulis

menempatkan subjek sebagai korban. Penulis teks lebih cenderung menggunakan verba pasif, seperti kutipan berikut.

- (2) “Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (pungli) penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah yang dipimpinnya.” (Ronalyw, 2017a: Paragraf 2, kal.2).
- (3) Muhammad Yusran selaku Kepsek SMA 5 dan Abdul Hajar sebagai Kepsek SMA 1 disangka memungut biaya terhadap ratusan siswa baru (Basri, 2017b: Paragraf 5, kal.1).
- (4) Ia dijemput untuk memenuhi pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pungli penerimaan siswa baru di SMA Negeri 5 Makassar (Basri, 2017e: Paragraf 2, kal.1).

Berdasarkan kutipan pada data (2), diketahui bahwa Ia (Abdul Hajar) diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar pada penerimaan siswa baru di sekolah yang dipimpinnya. Kalimat tersebut juga mengandung proses material yang bermakna perbuatan. Hal ini terlihat dari kalimat pasif transitif yang ditandai dengan frase verba pasif *diduga melakukan*. Artinya, pihak dominan memperkirakan Abdul Hajar ini melakukan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar. Hal yang sama pada data kalimat (3), dan (4). Pada kalimat (3) dijelaskan bahwa Muhammad Yusran selaku Kepsek SMA 5 dan Abdul Hajar sebagai Kepsek SMA 1 disangka memungut biaya terhadap ratusan siswa baru. Kalimat tersebut juga mengandung proses material yang bermakna perbuatan yang ditandai dengan frase verba pasif *disangka memungut*. Artinya, pihak dominan menyangka atau menduga Kepsek SMA 5 dan Kepsek SMA 1 memungut biaya terhadap ratusan siswa baru di SMAN 5 Makassar. Demikian halnya dengan data (4) yang menjelaskan bahwa Ia (Muhammad Yusran, Kepala SMAN 5 Makassar) dijemput untuk memenuhi pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus

dugaan pungli penerimaan siswa baru di SMA Negeri 5 Makassar. Kalimat tersebut juga mengandung proses material \yang bermakna perbuatan yang ditandai dengan frase verba pasif *dijemput untuk memenuhi*. Artinya, pihak dominan melakukan perbuatan berupa penjemputan terhadap tersangka atau pelaku pungli pada penerimaan calon siswa baru di SMAN 5 Makassar.

Dengan menggunakan kalimat pasif, penulis teks menghilangkan subjek dengan lebih menonjolkan sasaran di bagian depan. Hal ini mengindikasikan bahwa penulis teks berusaha melindungi si pelaku dari persepsi buruk masyarakat atau pembaca. Dengan menggunakan verba pasif, khalayak tidak akan menyalahkan atau menyudutkan posisi Kejari terkait dengan tindakan yang telah dilakukan terhadap pelaku pungli, Abdul Hajar dan Muhammad Yusran. Dengan mengedepankan sasaran, penulis teks lebih mengutamakan untuk menonjolkan pelaku pungli yang diposisikan sebagai korban. Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan kepada pembaca bahwa penghasil teks dalam hal ini media (*beritakotamakassar.fajar.co.id* dan *makassar.tribunnews.com*) tidak mendukung perbuatan pungli yang diduga dilakukan oleh kedua kepala sekolah tersebut. Media lebih mendukung masyarakat untuk memperjuangkan ideologi pemberantasan saber pungli yang cukup meresahkan dunia pendidikan yang ada di Makassar.

Penggunaan kalimat transitif dengan verba pasif ini merupakan strategi keduamedia (*beritakotamakassar.fajar.co.id* dan *makassar.tribunnews.com*) untuk membangun teks yang memiliki makna formal, dan kesan eufemisme untuk mendominasi pembaca atau masyarakat secara tidak langsung dalam memberikan informasi atau berita. Tujuannya adalah agar keberadaan media yang semakin kompetitif dalam menyajikan berita diakui oleh masyarakat.

Namun ini tidak berarti bahwa media mendiskreditkan subjek. Meskipun media memiliki kuasa dalam pemberitaan, media masih bersikap netral dan objektif terhadap

subjek dengan tidak mendeskreditkan subjek, seperti kutipan berikut.

- (5) Terkait dugaan pungli yang dialamatkan pada dirinya, Abdul Hajar *membantahnya*. Pembayaran dari siswa baru *bukan untuk saya gunakan pribadi*. Tapi dipakai untuk membeli kebutuhan sekolah. Seperti peralatan penunjang mutu belajar siswa,” terangnya. (Ronalyw. 2017a: Paragraf 10, kal.1-3).

Data (5) menjelaskan bahwa terkait dugaan pungli yang dialamatkan pada dirinya, Abdul Hajar *membantahnya*. Pembayaran dari siswa baru *bukan untuk digunakan pribadi*, tetapi dipakai untuk membeli kebutuhan sekolah, seperti peralatan penunjang mutu belajar siswa. Dengan menggunakan verba aktif *membantah*, penulis berusaha menunjukkan keprofesionalannya dengan tidak memihak kepada siapa pun, yang dibuktikan dengan menunjukkan pelaku pungli dan kekuasaannya. Kekuasaan pelaku pungli ditunjukkan melalui penolakan atau penyangkalan. Penyangkalan ini merupakan bentuk pembelaan diri pelaku terhadap perbuatan pungli yang dialamatkan kepadanya. Sikap yang tidak mendiskreditkan ini tampak pada strategi penulis dalam menampilkan aktor (pelaku pungli) dengan strategi penegasian, yaitu pada klausa negatif *bukan untuk saya gunakan pribadi* ditambah dengan keterangan penjelas yaitu *tapi dipakai untuk membeli kebutuhan sekolah, seperti peralatan penunjang mutu belajar siswa*. Hal ini mengindikasikan bahwa media sangat menjunjung profesionalitas dengan menjunjung ideologi institusinya dalam membela rakyat. Meskipun tidak menyetujui tindakan pungli, tetapi media tidak berusaha menyudutkan subjek. Media justru memberi peluang kepada subjek untuk melakukan pembelaan diri. Ketidakberpihakan media pada siapa pun juga tampak pada produksi teks yang menampilkan partisipan yang terlibat, seperti kutipan berikut.

- (6) “None *mengatakan*, guru dan kepala sekolah sebenarnya tahu betul bahaya

dan sanksi yang menjerat akibat pungli. Biar tidak diterbitkan edaran, dari dulu semua tahu jika pungli itu dilarang (Ronalyw. 2017a: Paragraf 14, kal.1-2)”

- (7) Disinggung soal dua kepala SMAN yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli, None-sapaan akrabnya-mengaku sudah menunjuk pelaksana tugas (Ronalyw. 2017d: Paragraf 3, kal.1).

Data (6) memberikan informasi tentang perkataan None bahwa guru dan kepala sekolah sebenarnya tahu betul bahaya dan sanksi yang menjerat akibat pungli. Biar tidak diterbitkan edaran, dari dulu semua tahu jika pungli itu dilarang. Proses material yang terdapat dalam data (6) bermakna ‘perbuatan’ yang terlihat dari frase verba *tahu betul* ‘mengerti sekali’ yang memberikan informasi kepada khalayak bahwa pada dasarnya guru dan kepala sekolah tahu akan pungli dan sanksinya, tetapi mereka tetap melakukannya. Realitas inilah yang ingin dibangun oleh penulis bahwa dengan mengetahui Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, tidaklah menjadi sebuah jaminan bagi seseorang (guru/ kepala sekolah) untuk tidak melakukan korupsi atau pungli, sedangkan data (7) memberikan informasi bahwa terkait dua kepala SMAN yang telah ditetapkan sebagai tersangka, None mengaku sudah menunjuk pelaksana tugas. Proses material yang terdapat dalam data (7) bermakna ‘perbuatan’ yang terlihat dari frase verba *sudah menunjuk* yang berarti sudah ada pelaksana tugas yang ditunjuk untuk menggantikan kepala sekolah yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli.

Praktik wacana yang dihadirkan penulis berita adalah pemunculan partisipan dengan strategi terbuka. Partisipan yang dihadirkan media adalah pihak yang secara institusi sangat berkaitan dengan subjek atau pelaku, yang dalam hal ini

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, None. Dengan penyebutan identitas, penulis berusaha menampilkan partisipan secara terbuka tanpa menyembunyikannya agar masyarakat mengetahui respons partisipan terkait dengan pungli yang sering dilakukan oleh kepala sekolah. Dengan menampilkan partisipan sebagai subjek, kalimat dalam konteks tersebut sebagai pemberi informasi yang memunculkan persepsi bahwa penulis teks ingin menyampaikan bahwa pernyataan itu disampaikan oleh None, selaku kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bukan pihak media atau penulis berita. Ini adalah strategi penulis dalam menghindari pernyataan yang berkekuatan hukum demi menjaga citra dan ideologi media sebagai pembela rakyat. Selain itu, strategi ini juga dimanfaatkan media untuk mendominasi pembaca atau masyarakat secara tidak langsung dalam memberikan informasi atau berita yang akurat agar keberadaan media diakui oleh pembacanya.

Keadaan

Proses material yang bermakna ‘keadaan’ dalam media *online* “*beritakotamakassar.fajar.co.id*” dapat dilihat pada kutipan berikut.

- (8) *Offline* itu adalah menyebarkan manfaat baik kepada orang sekitar dan siswa yang berprestasi. Bukan dengan meminta uang berdasarkan SSPB,” jelasnya (Ronalyw. 2017b: Paragraf 13, kal.4).

Dalam data (8) dijelaskan bahwa *Offline* itu adalah menyebarkan manfaat kepada orang sekitar dan siswa yang berprestasi, bukan dengan meminta uang berdasarkan sumbangan sukarela pendidikan berkualitas (SSPB). Kata *menyebarkan* bermakna ‘menyiarkan’ atau ‘membagi-bagikan’ sesuatu yang bermanfaat dalam hal ini dibukanya jalur *offline* terutama bagi siswa yang berprestasi. Akan tetapi, jalur *offline* yang sejatinya bertujuan untuk kebaikan terutama bagi siswa yang berprestasi ternyata disalahgunakan. Penyalahgunaan ini ternyata berkaitan dengan terbitnya SK

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 54 Tahun 2014 tentang Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas di Kota Makassar untuk kepentingan perbaikan kualitas pendidikan di dalam sekolah.

Dengan mengacu kepada Perwali tersebut, pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah menjadikan jalur *offline* sebagai peluang untuk memungut sumbangan (uang). Padahal, tindakan yang dilakukan sekolah yang meminta sumbangan kepada orang tua siswa sangat wajar jika mengacu kepada Perwali tersebut. Oleh karena itu, kata *menyebarkan* merupakan verba yang mengandung proses material yang bermakna *keadaan*, yaitu keadaan yang menggambarkan proses terjadinya pungli di sekolah yang berawal dari jalur *offline*. Melalui verba yang ditampilkan *menyebarkan* (manfaat) dan *meminta* (uang), penulis juga ingin menampilkan adanya pertarungan ideologi antara para partisipan dan pelaku tindakan itu sendiri dalam memaknai perwali dan jalur *offline*. Sebagian partisipan menganggap bahwa yang dilakukan Kepsek itu adalah wajar, dan sebagian partisipan lainnya menganggap salah, sedangkan bagi pelaku pungli sendiri menganggap bahwa itu wajar dengan mengacu pada Perwali tersebut, sedangkan penonjolan kata *offline* di awal kalimat merupakan strategi teks untuk memberikan gambaran bahwa media lebih memfokuskan diri pada pokok permasalahan terjadinya pungli di sekolah. Oleh karena itu, penulis menghadirkan praktik wacana berupa proses pemunculan jalur *offline*. Tujuannya adalah mendominasi pembaca dengan pemberian informasi secara detail. Data lainnya yang bermakna '*keadaan*' juga tampak pada data berikut.

- (9) Lebih jauh Subhan menjelaskan, pada saat momen penerimaan siswa baru, seluruh sekolah serentak melakukan pungli dengan dalih seragam dan perlengkapan sekolah (Ronalyw. 2017b: Paragraf 5, kal.1).

Data (9) menjelaskan bahwa pada saat momen penerimaan siswa baru, seluruh

sekolah serentak melakukan pungli dengan dalih seragam dan perlengkapan sekolah. Kalimat ini mengandung proses material yang bermakna '*keadaan*' karena menjelaskan tentang terjadinya pungli yang dilakukan secara serentak. Dengan mengedepankan keterangan di awal kalimat, penulis ingin memberitahukan keadaan atau momen yang sering digunakan pihak sekolah untuk melakukan pungli. Penerimaan siswa baru merupakan strategi sekolah untuk melakukan pungli dan secara implisit ada dominasi di dalamnya, yaitu dominasi berupa pemaksaan kepada siswa untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah di sekolah yang terkadang harganya jauh lebih mahal dari harga toko.

Kata *serentak melakukan* dapat diinterpretasikan bahwa dalam tingkat institusional pungutan liar di sekolah dipengaruhi oleh budaya korupsi (pungli) yang berkembang dalam institusi yang dalam hal ini adalah sekolah. Kasus pungli yang terjadi selama ini karena adanya semacam warisan turun temurun yang berlaku dan seakan menjadi sebuah pembenaran di institusi (sekolah) itu, terutama sekolah-sekolah favorit. Dalam perkembangannya, kasus pungutan liar di sekolah ini telah menjadi budaya dan terorganisir dengan baik yang melibatkan banyak pihak, seperti yang diungkapkan oleh Subhan (dalam Ronalyw, 2017b) bahwa pungli dilakukan secara serentak dan terkoordinasi. Artinya, komunikasi di semua level sangat rapi dan kompak. Selain itu, Subhan juga mengungkapkan bahwa yang terlibat pungli banyak, dan bukan hanya kepala sekolah, melainkan sampai ke atas. Data yang menunjukkan makna '*keadaan*' juga dilihat pada data berikut.

- (10) Sedikitnya ada 30 orang tua siswa yang telah dimintai keterangannya oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar (Ronalyw, 2017c: Paragraf 1, kal.1).
- (11) Penyidik mensinyalir keterlibatan pihak lain dalam praktik itu (Basri, 2017c: Paragraf 1, kal. 2).

- (12) Menurut Alham, keterangan saksi mengakui adanya pungutan kepada calon siswa. Namun pungutan itu diakui atas perintah tersangka Abdul Hajar selaku Kepala Sekolah (Basri, 2017d: Paragraf 5, kal.1—2).

Data (10) juga mengandung proses material yang bermakna ‘keadaan’ karena menjelaskan tentang keadaan 30 orang tua siswa yang telah dimintai keterangannya oleh penyidik Kejari Makassar. Dengan frase verba *telah dimintai* ini, penulis hanya ingin memberikan informasi kepada pembacanya bahwa sesuatu telah terjadi, yaitu 30 orang tua siswa yang bertindak sebagai saksi sudah diambil keterangannya oleh penyidik kejari tanpa harus menyebutkan siapa-siapa ketiga puluh orang tua siswa tersebut. Penonjolan 30 orang tua siswa di awal kalimat ini merupakan strategi penghasil teks (*beritakotamakassar.fajar.co.id*) dalam pemberian informasi kepada pembaca tentang banyaknya korban pungli di sekolah. Bentuk apresiasi penulis dalam pencapaian kinerja Kejari Makassar dilakukan dengan menyebutkan aktor. Pada data (11), proses material *keadaan* ditandai dengan verba *mensinyalir* yang berarti ‘memberitahukan atau menduga’. Hal ini dimaknai bahwa pihak dominan atau aktor memberitahukan atau menduga ada pihak lain yang terlibat dalam praktik pungli di sekolah. Verba *mensinyalir* digunakan untuk menjelaskan keadaan tentang keterlibatan pihak lain dalam praktik pungli di sekolah. Penulis (*makassar.tribunnews.com*) menampilkan penyidik sebagai aktor merupakan strategi penulis untuk memberikan informasi secara terbuka kepada pembacanya dan dengan menonjolkannya di bagian awal kalimat. Ini berarti media atau penulis lebih memfokuskan diri pada apa yang dilakukan oleh penyidik sebagai institusi yang bertugas dalam menangani kasus pemberantasan korupsi termasuk pungli sekaligus sebagai peringatan bagi pihak-pihak tertentu seperti kepala sekolah dan guru agar lebih waspada atau berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang sama. Proses

material yang bermakna ‘keadaan’ dalam data (12) ditandai dengan verba aktif *mengakui* yang berarti ‘menyatakan sebuah kebenaran’. Verba ini mewartakan ideologi kebenaran. Oleh karena itu, verba ini digunakan untuk menjelaskan keadaan tentang kebenaran pungutan liar yang dilakukan terhadap siswa. Kehadiran partisipan (Alham) sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar dan Abdul Hajar sebagai korban/pelaku pungli merupakan strategi penulis untuk mendominasi pembaca dalam pemberian informasi secara terbuka.

Peristiwa

Proses material yang bermakna ‘peristiwa/kejadian’ dalam media daring (*online*) dapat dilihat pada kutipan berikut.

- (13) “Dalam rentang waktu yang tak berjauhan, Kejaksaan Negeri Makassar menetapkan dua kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) jadi tersangka kasus pungutan liar (pungli). Yakni, Kepala SMAN 5 Muhammad Yusran dan Kepala SMAN 1 Abdul Hajar (Ronalyw, 2017b: Paragraf 1, kal.1).”
- (14) “Pihak sekolah kemudian melakukan penambahan rombongan belajar atau kelas.” (Ronalyw, 2017e: Paragraf 14, kal.2).”
- (15) Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar memeriksa dua guru atas kasus dugaan praktik pungutan liar (pungli) penerimaan siswa baru di SMA Negeri 5 Makassar (Basri, 2017a: Paragraf 1, kal.1).

Proses material yang muncul pada data (13) bermakna peristiwa. Peristiwa yang dimunculkan dalam data (13) tersebut adalah penetapan dua kepala sekolah sebagai tersangka pungutan liar (pungli). Peristiwa itu dimunculkan melalui verba aktif *menetapkan* yang berarti ‘memastikan’, yaitu memastikan dua kepala sekolah jadi tersangka pungli. Kehadiran aktor (Kejari Makassar) merupakan

salah satu politik media untuk memperlihatkan kekuasaan Kejari sebagai institusi yang bertanggung jawab penuh dalam pemberantasan korupsi (pungli). Keterangan waktu yang ditampilkan di awal kalimat merupakan sebuah gambaran bahwa media sangat mengapresiasi kinerja kejaksaan yang cepat, sedangkan pelaku tindakan pungli yang ditampilkan sebagai objek dalam kalimat yang disertai dengan penjelasan identitas memberikan gambaran pemarginalan. Pemarginalan ini diakibatkan oleh kekuasaan media sebagai pemroduksi teks. Selain itu, pemarginalan ini juga terlihat dari kecenderungan media yang lebih menonjolkan kinerja kejaksaan daripada pelaku yang merupakan objek penderita/korban. Sementara pada data (14) proses material bermakna '*peristiwa*' ditandai dengan verba *melakukan*. Pihak sekolah merupakan aktor yang ditampilkan sebagai pihak yang terdominasi karena melakukan penambahan kelas. Pemosisian aktor di awal kalimat sebagai bentuk keprihatinan media kepada sekolah-sekolah yang melakukan penambahan kelas sebagai modus untuk melakukan pungli. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh *beritakotamakassar.fajar.co.id*, media *makassar.tribunnews.com* juga lebih mengedepankan aktor atau pihak dominan dalam proses material yang bermakna '*peristiwa*' seperti pada data (15) yang didukung dengan verba aktif *memeriksa*. Hal ini mengindikasikan bahwa media ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pihak dominan inilah (Kejari) yang memiliki kekuasaan penuh untuk menangani kasus hukum tentang pemberantasan saber pungli termasuk dalam hal pemeriksaan saksi. Kehadiran *goal* atau objek (guru) merupakan partisipan yang dianggap mengetahui kebenaran tentang pungli di sekolah itu (SMAN 5 Makassar). Hal ini merupakan strategi penulis atau media dalam mendominasi pembaca atau masyarakat secara penuh melalui pemberitaan yang lebih baru, real atau akurat sebagai pencapaian visi dan ideologi *spirit* yang diembannya. Tujuan lain, selain memotivasi semangat pembaca atau masyarakat melalui berita-berita terbaru, real, dan akurat

yang disajikan, tentunya adalah pengakuan akan keberadaan media daring *makassar.tribunnews.com* itu sendiri.

Perilaku

Proses material yang bermakna '*perilaku*' dapat dilihat pada data berikut.

- (16) "Terus terang, kita kecewa. Karena perbuatan mereka telah merusak tatanan pendidikan (Ronalyw, 2017b: Paragraf 17, Kal.1)"
- (17) Kepala Dinas Pendidikan, Irman Yasin Limpo dibuat gerah dengan dugaan praktik pungutan liar yang menyeret dua kepala SMA Negeri ternama di Makassar (Ronalyw, 2017d: Paragraf 1, kal.1)"
- (18) Irman berharap pemecatan ini bisa menjadi pelajaran bagi pihak sekolah lain untuk mencegah dan mengantisipasi praktik pungli (Basri, 2017b: Paragraf 7, kal. 2).

Data (16) mengandung proses material yang bermakna '*perilaku*' dan dalam teori Fairclough masuk ke dalam kategori proses mental. Proses material ini teridentifikasi melalui frase verba yang digunakan teks, yaitu *telah merusak*. Frase ini memberikan penafsiran yang buruk, terhadap suatu benda yang dalam hal ini adalah Pungli. Pungli identik dengan perilaku buruk yaitu perusak tatanan pendidikan yang alih-alih bertujuan mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Perilaku pungli justru mencerminkan kontradiksi antara perilaku dengan tujuan yang ingin dicapai.

Praktik wacana yang dihadirkan oleh penulis teks menggunakan hubungan sebab-akibat. Dengan meletakkan akibat pada bagian awal, hal tersebut menggambarkan bahwa penulis teks ingin menekankan kepada khalayak agar sebelum melakukan pungli, terlebih dahulu memikirkannya secara matang-matang karena perilaku buruk pasti juga akan mendatangkan keburukan atau bahaya bagi pelakunya. Hal ini merupakan strategi penulis

dalam menyampaikan pesan moral kepada pembacanya agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuannya adalah ingin membentuk kesadaran khalayak akan bahaya atau dampak pungli; sedangkan pada data (17) proses material ini ditandai dengan kata kerja *dibuat* yang berasal dari kata *buat* atau *membuat* yang berarti ‘menghasilkan; menyebabkan’. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dugaan praktik pungli yang terjadi di sekolah menyebabkan Kepala Dinas Pendidikan, Irman Yasin Limpo gerah. Praktik wacana yang dihadirkan oleh penulis adalah kehadiran partisipan sebagai *goal* (objek penderita) secara terbuka. Tujuannya agar pembaca atau masyarakat mengetahui bagaimana reaksi partisipan sebagai orang yang bertanggung jawab secara institusi terhadap perilaku bawahannya (kepala sekolah) yang melakukan praktik pungli. Posisi partisipan sebagai *goal* dimaknai bahwa secara institusi, praktik pungli itu akan berefek buruk bagi institusi. Sementara, kata *gerah* digunakan penulis untuk menunjukkan bahwa partisipan merasa marah, kecewa, dan sebagainya atas perilaku kepala sekolah yang melakukan pungli. Penekanan pada kata *gerah* sebagai aktor dilakukan penulis untuk menunjukkan atau efek dari peristiwa pungli tersebut.

Pada data (18), proses material ini ditandai dengan kata kerja *menjadi* yang berarti ‘dibuat untuk’ sehingga dapat ditafsirkan bahwa pemecatan dibuat untuk dijadikan pelajaran bagi pihak sekolah lain untuk mencegah dan mengantisipasi praktik pungli. Frase verba *bisa menjadi* digunakan oleh penulis untuk membangun sebuah ideologi bahwa segala peristiwa atau kejadian buruk yang terjadi memberikan pelajaran penting dalam hidup. Pelajaran hidup dalam hal ini adalah mencegah terjadinya pungli, sedangkan kata *pemecatan* yang diposisikan sebagai aktor mengindikasikan bahwa penulis ingin menyampaikan kepada pembaca atau masyarakat bahwa tindakan buruk yang dilakukan oleh seorang pegawai atau karyawan tentu akan berakhir buruk, seperti pemecatan.

Ketransitifan Teks Berita Pungli di Sekolah dalam Media Daring: Sebuah Eksplanasi Situasional

Terjadinya pungutan liar (pungli) di sekolah pada tahun 2017 dilatarbelakangi oleh situasi penerimaan siswa baru terutama jalur *offline* yang diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi. Namun, dengan terbitnya SK Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 54 Tahun 2014 tentang Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas di Kota Makassar untuk kepentingan perbaikan kualitas pendidikan di dalam sekolah, jalur *offline* ini dijadikan sebagai peluang bagi pihak sekolah untuk melakukan pungli. Berbagai modus yang dilakukan oleh pihak sekolah yang mengarah pada pungutan liar. Bahkan, ini dilakukan secara serentak dan terkoordinasi. Selain itu, terbitnya Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan munculnya berbagai laporan pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah, terutama sekolah-sekolah favorit seperti SMAN 1 Makassar dan SMAN 5 Makassar yang pada akhirnya menjadikan kepala sekolahnya tersangka pungli.

Institusional

Aspek institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam proses produksi wacana berita pungli. Institusi yang dominan dalam teks berita pungli ini adalah Kejari Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, dan media itu sendiri. Media daring *beritakotamakassar.fajar.co.id* yang menganut ideologi pembelaan rakyat lebih banyak merepresentasikan realitas tersebut dengan membangun relasi yang terkait dengan pungli di sekolah-sekolah favorit di Makassar dengan menggunakan strategi wacana terbuka yang menghadirkan partisipan, baik partisipan yang bertindak sebagai aktor atau pihak dominan, maupun partisipan yang diposisikan sebagai *goal*

atau objek penderita. Dengan strategi terbuka penulis melakukan pendominasian dalam pemberian informasi kepada pembacanya atau masyarakat tentang pungli di sekolah sebagai bukti keberpihakan media kepada masyarakat dalam memberantas pungli. Begitu juga dengan media daring *makassar.tribunnews.com* yang mengemban visi misi tentang spirit juga menggunakan strategi wacana terbuka dengan lebih mengedepankan aktor dari pihak dominan untuk menunjukkan apresiasinya terhadap kinerja Kejari Makassar. Hal ini digunakan untuk memotivasi semangat pembaca atau masyarakat melalui berita-berita terbaru, real, dan akurat yang disajikan. Sementara kedudukan Kejari sebagai pihak dominan menguasai pemberitaan kedua media ini. Pemberitaan tentang pungli memperlihatkan status dan kedudukan Kejari sebagai institusi yang secara integritas bertanggung jawab penuh terhadap penanganan dan pemberantasan kasus korupsi termasuk pungutan liar di sekolah; sedangkan institusi atau lembaga pendidikan dalam pemberitaan menempati posisi sebagai objek penderita. Artinya, kasus pungli ini tentunya akan berpengaruh buruk dan mencoreng citra pendidikan terutama institusi atau lembaga pendidikan yang ada di Makassar, sedangkan pelaku pungli dalam pemberitaan merupakan orang yang dimarginalkan dari pihak dominan dan media. Pemarginalan yang dilakukan oleh media sebagai reaksi ketaksetujuannya dengan perbuatan pungli yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Sosial

Aspek sosial lebih melihat pada aspek makro di dalam masyarakat secara menyeluruh baik aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek politik. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa aspek sosial yang melatari pemberitaan ini adalah munculnya fenomena korupsi di sekolah-sekolah favorit seperti SMAN 1 Makassar dan SMAN 5 Makassar yang selama ini tidak pernah terbayangkan akan bersentuhan dengan hukum. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja penegak

hukum dalam memberantas kasus korupsi termasuk pungutan liar di sekolah yang patut diapresiasi. Dari aspek ekonomi, munculnya ideologi kapitalis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individualis atau kelompok dengan serentak melakukan pungli di sekolah. Sementara dari ekonomi media, pendominasian informasi atau pemberitaan tentang pungli di sekolah meningkatkan pendapatan media yang ditandai dengan rating media yang masing-masing berada di sepuluh besar. Dari aspek politik, pemberitaan pungli ini mencuat ke permukaan menjelang Pilkada Sulsel berlangsung sehingga kemunculan beberapa partisipan yang berlatar belakang politikus dalam pemberitaan *beritakotamakassar.fajar.co.id* mencuatkan pertarungan dalam meraih simpati atau dukungan rakyat. *beritakotamakassar.fajar.co.id* sebagai media dengan misi pembelaan rakyat mencoba memengaruhi pembacanya untuk menjadi pemilih yang cerdas melalui strategi pendominasian informasi dengan menampilkan pernyataan-pernyataan para partisipan tentang kasus pungli di sekolah. Akan tetapi, *makassartribunnews.com* sebagai media spirit lebih bersikap netral dengan tidak menunjukkan keberpihakannya pada siapa pun. Media ini lebih berfokus pada pemberitaan tentang kasus pungutan liar yang dapat meningkatkan rating dan keuntungan media.

PENUTUP

Dari segi ketransitifan, media daring (*beritakotamakassar.fajar.co.id* dan *Makassar.tribunnews.com*) menggunakan proses material bermakna perbuatan, keadaan, peristiwa, dan proses mental (perilaku) dalam memberitakan kasus pungli di sekolah. Ketransitifan ini mengungkapkan bahwa kedua media daring ini lebih banyak menggunakan verba aktif daripada verba pasif. Hal ini menandakan bahwa media tersebut lebih cenderung menyebutkan aktor (subjek) daripada menyembunyikan subjek, terutama pada aktor atau subjek dominan. Subjek dominan ditampakkan atau ditonjolkan dengan verba aktif, sedangkan subjek yang

terdominasi ditampilkan melalui verba pasif. Subjek dominan adalah subjek yang memiliki kuasa baik secara institusi maupun berdasarkan kelas atau status sosial terhadap pelaku. Subjek dominan dalam kasus ini adalah Kejari Makassar, sedangkan subjek terdominasi adalah pihak-pihak yang secara institusi dikuasai oleh subjek dominan yang dalam hal ini adalah pelaku pungli (kepala sekolah). Verba aktif yang lebih dominan digunakan adalah verba aktif yang menyatakan makna 'perbuatan'. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua media sangat mendukung langkah atau perbuatan (tindakan) yang dilakukan oleh lembaga hukum (Kejari) dalam menangani kasus korupsi seperti pungli di sekolah. Keberpihakan media terhadap aktor atau subjek dominan (Kejari) tampak dalam pemberitaan *makassar.tribunnews.com* dengan mendominasi pemberitaan melalui penonjolan pihak kejari sebagai aktor di awal kalimat, sedangkan *beritakotamakassar.fajar.co.id* lebih berfokus pada pemberitaan pungli dengan penonjolan subjek yang terdominasi sebagai aktor di awal kalimat yang dimaknai bahwa media mengecam pelaku pungli. Hal ini sesuai dengan ideologi media, yaitu pembelaan rakyat sehingga dalam pemberitaan penulis lebih cenderung pada sasaran untuk menggambarkan dukungannya pada rakyat dalam memberantas pelaku pungli di sekolah. Kekuasaan yang begitu kental ditonjolkan penulis adalah kekuasaan posisional atau institusional yang terlihat dari masing-masing partisipan. Setiap partisipan memperlihatkan kekuasaannya dalam memberantas pungli di sekolah dan ideologi yang tampak adalah ideologi mempertahankan dan menjunjung visi dan misi lembaga atau institusi masing-masing. Namun, secara umum ideologi yang dibangun penulis adalah ideologi pemberantasan pungli di sekolah.

Praktik wacana yang dilakukan oleh kedua media daring dalam memberitakan kasus tentang pungutan liar di sekolah adalah strategi wacana terbuka dan formal dengan menampilkan partisipan secara terbuka. Strategi ini merupakan politik media untuk

mendominasi pembaca dalam memberikan informasi serta meraih simpatik pembaca sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat dalam memperjuangkan saber pungli. strategi yang digunakan partisipan terutama yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini adalah strategi menghindar dengan cara penegasian dan strategi yang dilakukan oleh pelaku pungli terkait dengan kasus yang dilakukannya adalah strategi pembelaan diri dengan cara penyangkalan.

Dari segi praktik sosiokultural dapat dijelaskan bahwa pungutan liar yang terjadi dalam sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya situasional, institusional, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan. (2017a), Guru SMAN 5 Makassar Benarkan Ada Pungli. Diambil dari <https://makassar.tribunnews.com/2017/03/06/guru-sman-5-makassar-benarkan-ada-pungli>. (Diakses pada tanggal 9 Juli 2018).
- Basri, Hasan. (2017b), Tersangka Pungli, Kepsek SMAN 1 dan SMAN 5 Makassar Dicopot. Diambil dari <https://makassar.tribunnews.com/2017/03/08/tersangka-pungli-kepsek-sman-1-dan-sman-5-makassar-dicopot>. (Diakses pada tanggal 9 Juli 2018).
- Basri, Hasan. (2017c), Kejaksaan Pastikan Masih Ada Tersangka Baru Pungli SMA di Makassar. Diambil dari <https://makassar.tribunnews.com/2017/03/20/kejaksaan-pastikan-masih-ada-tersangka-baru-pungli-sma-di-makassar>. (Diakses pada tanggal 9 Juli 2018).
- Basri, Hasan. (2017d), Pungut Pembayaran Calon Siswa Baru, Dua Guru SMA 1 Makassar Diperiksa. Diambil dari <https://makassar.tribunnews.com/2017/03/23/pungut-pembayaran-calon-siswa-baru-dua-guru-sma-1-makassar-diperiksa>. (Diakses pada tanggal 9 Juli 2018).

- Basri, Hasan. (2017e), Ada Fakta Baru, Kejari Jemput Paksa Kepsek SMA 5 Makassar di Lapas. Diambil dari <https://makassar.tribunnews.com/2017/03/27/ada-fakta-baru-kejari-jemput-paksa-kepsek-sma-5-makassar-di-lapas>. (Diakses pada tanggal 9 Juli 2018).
- Fairclough, N. (1989), *Language and Power*. New York: Longman Group UK Limited.
- Fairclough, N. (1995), *Critical Discourse Analysis*. New York: Longman Group UK Limited.
- Fairclough, N. (2003), *Relasi Bahasa, Kekuasaan dan Ideologi*. Malang: Boyan Publishing.
- Fowler, R. (1986), *Linguistic Criticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Haryatmoko. (2017), *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis), Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, Wieke Ayu. (2012), Diskriminasi Perempuan dalam Berita Harian Surya: Kajian Wacana Kritis. *Skriptorium*, Vol.1, No.3, pp.134-144.
- Rahmat Prayogi, N. E. (2016), Wacana Berita Bertajuk Korupsi dalam Situs Indonesia dan Implikasi Pembelajaran Analisis Wacana. *J-Symbol (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)*, April 2016, pp.1-10.
- Rahmawati, D. E. (2017), Praktik Diskursif terhadap Moto Universitas Airlangga Surabaya :"Excellence With Morality". *Medan Bahasa, Jurnal Ilmiah Kebahasaan*, Vol. 11, No.2, pp.31-40.
- Rasyid, A. (2009), Nilai Relasional Model Kalimat dalam Wacana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2008-2013: Analisis Wacana Kritis. *Sawerigading, Volume 15, Nomor 2, Agustus 2009*, pp. 261-273.
- Ronalyw. (2017a), Kepala SMAN 1 Tersangka Pungli. Diambil dari <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/03/01/kepala-sman-1-tersangka-pungli> (Diakses pada tanggal 9 Juli 2018).
- Ronalyw. (2017b), Ketua Ombudsman: Pungli di SMA Gila-Gilaan. Diambil dari <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/03/02/ketua-ombudsman-pungli-di-sma-gila-gilaan> (Diakses pada tanggal 9 Juli 2018).
- Ronalyw. (2017c), Jaksa Periksa 30 Orang Tua Siswa SMAN 5. Diambil dari <https://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/03/03/jaksa-periksa-30-orang-tua-siswa-sman-5/> (Diakses pada tanggal 9 Juli 2018).
- Ronalyw. (2017d), Mutasi Kepala SMA/SMK Usai UN. Diambil dari <https://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/03/06/mutasi-kepala-sekolah-usai-un/> (Diakses pada tanggal 9 Juli 2018).
- Ronalyw. (2017e), Kepsek Butuh Evaluasi, Bukan Mutasi. Diambil dari <https://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/03/07/kepsek-butuh-evaluasi-bukan-mutasi/> (Diakses pada tanggal 9 Juli 2018).
- Santoso, A. (2008), Penggunaan Gramatika dalam Wacana Politik: Studi Representasi Bahasa sebagai Sistem Makna Sosial dan Politik. *Diksi, Vol. 15, Nomor 2, Juli 2018*, pp. 221-233.
- Santoso, A. (2012), *Studi Bahasa Kritis*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiawan, Y. B. (2011), Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka. *MAKNA, Vol.2, No.1*, pp. 13-20.
- Suharyo, S. M. (2014), Bahasa dan Ideologi: Mengungkap Ideologi dan Kekuasaan Simbolik di Balik Penggunaan Bahasa (Kajian Teks Media melalui Analisis Wacana Kritis). *Humanika, Vo. 19, No. 1, 2014*, pp. 42-58.
- Sumarti, E. (2010), Analisis Wacana Kritis Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Litera, Volume 9, Nomor 1, April 2010*, pp. 19-39.

- Sunaidin Ode Mulae, S. M. (2014), Analisis Ketransitifan dalam “Roots of The North Maluku Conflict” di Jakarta Post (1999): Analisis Wacana Kritis. *Sosiohumaniora, Volume 16 Nomor 1*, pp. 77-83.
- Vidiadari, I. S. (2017) Relasi Gender dalam *Journal of Chemical Information and Modeling, Vol.5, No. 2, Juni 2017*, pp. 259-290.
- Wartasulsel. (2018), Daftar Rangking 50 Besar Media Online di Sulsel Versi Alexa-Warta Sulsel. Diambil dari wartasulsel.net (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2018).
- Winarti, Putri Budi. (2012) Representasi Intertekstual (Kutipan Langsung dan Kutipan Tidak Langsung) dan Tekstual (Ketransitifan) dalam Wacana berita Bom Bunuh Diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton. *Students e-Journal, Vol. 1, No. 1*, pp. 1-13.